

DAFTAR PUSTAKA

- Choiril Huda, Moch. 2013. **Jurnal: Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup.** Perspektif: Surabaya.
- Deni Djakapermana, Ruchyat. **Jurnal: Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan.**
- Hasni. 2010. **Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah.** Rajawali Pers: Jakarta.
- Helmi. 2012. **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.** Sinar Grafika: Jakarta
- HR, Ridwan. 2006. **Hukum Administrasi Negara.** Rajawali Pers: Jakarta.
- Kelsen. Hans. 2010. **Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni).** Edisi Indonesia, Terjemahan oleh Raisul Mauttaqien, Cetakan Ketujuh. PT. Nua Media. Bandung.
- M Hadjon, Philipus. 2005. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.** Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Paramita. 2013. **Skripsi: Bentuk Privatisasi dalam Pengelolaan Lapangan Karebosi Kabupaten Pinrang.** Universitas Hasanuddin: Pinrang.
- Rellua ,Olivianty . 2013. **Prose Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai.** Lex Administratum

- Ridwan, H. Juniarto dan Achmad Sodik S. 2009. **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**. Nuansa: Bandung
- Siagian, S.P. 1980. **Administrasi Pembangunan**. PT. Gunung Agung: Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2010. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Situmorang, Victor. 1998. **Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**. Rineka Cipta: Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2012. **Aspek Hukum Kepabeanan**. Sinar Grafika: Jakarta
- Utrecht, E. 1985. **Pengantar Hukum Administrasi Negara. Cetakan Kedelapan**. Jakarta: Ichtiar Jakarta.

Sumber Hukum:

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.r 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional

Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan
Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
17/Permen-KP/ 2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2006

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pinrang 2010-2030

Modul Terapan: Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi
pantai. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan
Ruang .

Lampiran Gambar



